

Pemberontakan PRRI dan Permesta: Ketegangan Politik Di Awal Orde Lama (1957-1958)

Subhan Rizki Dayani¹, Tati Rohayati², Ahmad Maftuh Sujana³

^{1,2,3}UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia

Email koresponden: 221350026.subhanr@uinbanten.ac.id

Abstrak

Pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Semesta) merupakan dua gerakan separatis yang mencerminkan puncak ketegangan politik dan militer di awal masa Orde Lama, khususnya pada periode 1957–1958. Artikel ini mengkaji latar belakang kemunculan kedua gerakan tersebut, yang dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat di Jakarta, serta dominasi kekuatan militer tertentu dalam tubuh Angkatan Darat. Melalui pendekatan historis dan analisis politik, tulisan ini menggambarkan dinamika konflik antara pusat dan daerah, peran aktor-aktor militer dan sipil, serta respons pemerintah dalam menanggulangi ancaman disintegrasi. Pemberontakan ini bukan hanya soal pengaruh regional, melainkan juga

Kata kunci: PRRI, Permesta, Orde Lama, konflik pusat-daerah, disintegrasi, sejarah politik Indonesia

Pendahuluan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini menghadapi berbagai tantangan besar dalam upaya membentuk suatu tatanan politik dan sosial yang stabil. Masa awal kemerdekaan diwarnai dengan dinamika politik yang fluktuatif, persoalan ekonomi yang belum tertata, serta relasi pusat dan daerah yang penuh ketegangan. Salah satu fase penting yang menunjukkan krisis dalam hubungan tersebut terjadi pada akhir dekade 1950-an, yakni melalui pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Semesta). Kedua gerakan ini meletus pada kurun waktu 1957–1958 dan menjadi simbol dari ketidakpuasan daerah terhadap dominasi pemerintah pusat yang berpusat di Jakarta.

Pemberontakan PRRI dan Permesta tidak dapat dipahami hanya sebagai gejala separatisme atau perlawanan terhadap kekuasaan negara. Lebih dari itu, peristiwa ini mencerminkan kompleksitas situasi politik Indonesia pasca-kemerdekaan, terutama dalam hal distribusi kekuasaan, pengelolaan ekonomi nasional, dan dominasi elite politik serta militer di



pusat. Daerah-daerah seperti Sumatra dan Sulawesi merasa diabaikan, baik dalam hal pembangunan ekonomi maupun dalam representasi politik di tingkat nasional. Kekecewaan tersebut kemudian melahirkan desakan untuk perubahan sistem pemerintahan yang lebih adil dan desentralistik.

Situasi menjadi semakin rumit dengan adanya persaingan antarfraksi dalam tubuh militer, terutama di Angkatan Darat, serta ketegangan ideologi antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis. Dalam konteks tersebut, PRRI dan Permesta muncul bukan hanya sebagai upaya koreksi terhadap kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai ekspresi krisis identitas dan arah politik bangsa yang masih mencari bentuknya. Persoalan loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kekuatan militer daerah, serta campur tangan asing seperti Amerika Serikat melalui CIA juga menjadi elemen yang memperumit dinamika pemberontakan ini.

Kajian terhadap PRRI dan Permesta menjadi penting karena memberikan gambaran bagaimana Indonesia pada masa awal Orde Lama masih berada dalam proses negosiasi antara kekuatan-kekuatan politik dan militer yang berbeda pandangan mengenai bentuk negara, distribusi kekuasaan, dan arah pembangunan. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa pembentukan negara bangsa (*nation-building*) di Indonesia tidak berlangsung secara mulus, melainkan melalui konflik internal yang tajam.

Penelitian ini akan membahas secara lebih dalam mengenai latar belakang munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta, dinamika gerakan tersebut, dan dampaknya terhadap perkembangan politik nasional Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan historis dan analisis politik, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana konflik internal di awal Orde Lama menjadi cerminan dari kegagalan konsensus nasional dalam mengelola kemajemukan dan ketimpangan struktural di tubuh Republik Indonesia yang baru berdiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan berasal

dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku sejarah, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan artikel akademik yang membahas dinamika politik Indonesia pada masa Orde Lama, khususnya pada periode 1957–1958 saat meletusnya pemberontakan PRRI dan Permesta. Analisis dilakukan dengan menelaah konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi munculnya dua gerakan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta historis serta menganalisis hubungan sebab-akibat antara kebijakan pemerintah pusat dan ketidakpuasan daerah yang menjadi pemicu utama konflik (Wijaya et al., 2025).

Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji secara bagaimana ketegangan antara pusat dan daerah, dinamika militer, serta konflik ideologis turut membentuk jalannya sejarah politik Indonesia pada masa awal Orde Lama.

Hasil dan Pembahasan

A. Latar belakang politik dan ekonomi pasca kemerdekaan melahirkan pemberontakan PRRI dan Permesta

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka sepenuhnya. Transisi dari negara jajahan menjadi negara merdeka tidak serta-merta berjalan mulus. Indonesia harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kolonialisme Belanda dalam periode Revolusi Fisik (1945–1949), sekaligus membangun fondasi pemerintahan yang stabil, memulihkan ekonomi yang terpuruk akibat perang, serta menyatukan keragaman sosial dan politik dalam masyarakat yang luas dan heterogeny (Supriatna, 2020).

Pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, Indonesia mulai memasuki era Demokrasi Parlementer (1950–1959). Sistem ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri, sementara presiden

berperan sebagai kepala negara yang lebih bersifat simbolis. Demokrasi parlementer membuka ruang bagi kehidupan politik yang relatif bebas, terutama melalui sistem multipartai. Namun, kebebasan tersebut tidak dibarengi dengan kedewasaan politik yang cukup.

Indonesia kala itu memiliki puluhan partai politik dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI mendominasi panggung politik nasional, namun tidak ada satu pun yang berhasil memperoleh mayoritas mutlak dalam parlemen. Akibatnya, pembentukan kabinet selalu membutuhkan koalisi antarpolisi yang rapuh dan sering kali dibangun atas dasar kompromi politik yang tidak kokoh. Sepanjang periode 1950–1959, terjadi tujuh kali pergantian kabinet dimulai dari kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951) hingga kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959), dengan masa kerja yang rata-rata singkat. Situasi ini membuat pemerintahan berjalan tidak Pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, Indonesia mulai memasuki era Demokrasi Parlementer (1950–1959). Sistem ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri, sementara presiden berperan sebagai kepala negara yang lebih bersifat simbolis. Demokrasi parlementer membuka ruang bagi kehidupan politik yang relatif bebas, terutama melalui sistem multipartai. Namun, kebebasan tersebut tidak dibarengi dengan kedewasaan politik yang cukup.

Indonesia kala itu memiliki puluhan partai politik dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI mendominasi panggung politik nasional, namun tidak ada satu pun yang berhasil memperoleh mayoritas mutlak dalam parlemen. Akibatnya, pembentukan kabinet selalu membutuhkan koalisi antarpolisi yang rapuh dan sering kali dibangun atas dasar kompromi politik yang tidak kokoh. Sepanjang periode 1950–1959, terjadi tujuh kali pergantian kabinet dimulai dari kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951) hingga kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959), dengan masa kerja yang rata-rata

singkat. Situasi ini membuat pemerintahan berjalan tidak efektif, karena perhatian elit politik lebih banyak tersita pada dinamika kekuasaan daripada pada persoalan rakyat.

Ketidakstabilan politik ini menimbulkan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola negara. Pemerintah menjadi sulit merumuskan dan menjalankan kebijakan jangka panjang, terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Sistem yang seharusnya mencerminkan demokrasi yang sehat justru menghasilkan praktik politik transaksional, pertarungan kekuasaan antarpolisi, dan kebijakan yang berubah-ubah tergantung pada komposisi kabinet. Dalam konteks tersebut, krisis kepemimpinan nasional pun muncul, karena tidak ada figur yang benar-benar mampu menyatukan kepentingan nasional secara utuh.

Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sangat rapuh. Revolusi fisik dan masa transisi pemerintahan menguras banyak sumber daya negara. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam membiayai pembangunan akibat lemahnya penerimaan negara dan tingginya beban pengeluaran. Salah satu masalah yang paling mencolok adalah hiperinflasi. Pada awal 1950-an, laju inflasi mencapai angka lebih dari 100% per tahun, diperparah oleh kebijakan pencetakan uang tanpa kontrol produksi yang memadai. Harga barang-barang kebutuhan pokok melambung tinggi, daya beli masyarakat menurun drastis, dan kelangkaan barang terjadi di berbagai daerah.

Kondisi ini diperburuk oleh penurunan volume ekspor akibat ketidakstabilan politik dalam negeri dan infrastruktur yang belum memadai. Banyak perusahaan yang sebelumnya dikelola oleh Belanda dinasionalisasi tanpa diiringi dengan kesiapan manajerial, sehingga produktivitas nasional tidak berkembang optimal. Sektor industri dan pertanian mengalami stagnasi, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah semakin tajam, terutama karena hasil kekayaan dari luar Jawa seperti minyak, hasil hutan, dan komoditas ekspor lainnya banyak diserap oleh pusat, tetapi tidak dibarengi dengan pembangunan yang seimbang di daerah.

Ketimpangan ini menimbulkan ketidakpuasan di berbagai wilayah, terutama di Sumatra dan Sulawesi. Daerah-daerah ini merasa bahwa Jakarta terlalu dominan dalam menentukan kebijakan ekonomi dan politik, sementara aspirasi serta kontribusi daerah tidak dihargai secara adil. Ketidakpuasan tersebut kemudian mendorong tuntutan akan otonomi yang lebih luas. Namun, permasalahan yang terjadi tidak hanya bersumber dari ketimpangan ekonomi semata, melainkan juga dari persoalan politik yang semakin kompleks. Permasalahan politik pada masa awal Orde Lama tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga ideologis dan personal. Sistem multipartai yang berlaku membuka ruang bagi persaingan antarideologi yang tajam, khususnya antara nasionalisme, Islamisme, dan komunisme. Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai menunjukkan kebangkitan dengan dukungan kuat dari kalangan buruh dan petani, sedangkan partai-partai Islam seperti Masyumi merasa terpinggirkan oleh dinamika politik yang semakin mengakomodasi PKI. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga menjalar ke daerah-daerah, memperparah polarisasi sosial dan politik.

Pemerintah pusat semakin kehilangan arah dalam membangun konsensus nasional. Presiden Soekarno yang awalnya bersikap pasif dalam sistem parlementer mulai merasa frustrasi dengan instabilitas kabinet yang terus berganti. Ia kemudian menawarkan konsep Demokrasi Terpimpin, yang menekankan perlunya sentralisasi kekuasaan dan kepemimpinan tunggal demi stabilitas nasional. Konsep ini mendapat penolakan dari sebagian elit politik dan militer, terutama mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan pusat. Ketegangan memuncak pada 5 Juli 1959 saat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Langkah tersebut memperkuat posisi Soekarno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan membuka jalan bagi lahirnya poros politik NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Keterlibatan PKI dalam struktur pemerintahan membuat sebagian kalangan militer dan tokoh-tokoh sipil daerah semakin khawatir. Mereka menilai bahwa pemerintahan pusat tidak lagi netral secara ideologis, dan justru mengakomodasi satu ideologi tertentu yang dianggap membahayakan keutuhan negara.

Kekecewaan terhadap dominasi pusat semakin dalam, terutama di kalangan militer daerah. Para komandan di luar Jawa merasa kebijakan pusat terlalu sentralistik dan tidak memberi ruang partisipasi bagi militer lokal. Tokoh-tokoh seperti Letkol Achmad Husein di Sumatra dan Letkol Ventje Sumual di Sulawesi Utara mulai menyalurkan ketidakpuasan tersebut ke dalam bentuk gerakan politik yang menuntut reformasi sistem pemerintahan (Kurniawan, 2019).

Dalam konteks itulah muncul pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Sulawesi. Kedua gerakan ini tidak serta-merta dapat dipahami sebagai aksi separatisme, melainkan sebagai reaksi terhadap krisis nasional yang kompleks, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Meskipun akhirnya berujung pada konfrontasi bersenjata, PRRI dan Permesta mencerminkan kegagalan komunikasi politik antara pusat dan daerah serta runtuhnya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang berlaku saat itu (Aryasahab, 2023).

Dengan demikian, pemberontakan PRRI dan Permesta menjadi cerminan dari ketegangan struktural dalam sejarah awal Orde Lama. Mempelajari latar belakang kedua gerakan ini bukan hanya penting untuk memahami dinamika politik tahun 1950-an, tetapi juga untuk melihat akar-akar ketimpangan dan konflik yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional Indonesia.

B. Kronologi dan Karakteristik Pemberontakan PRRI dan PERMESTA

PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) adalah gerakan politik dan militer yang muncul pada 15 Februari 1958 sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, terutama karena kekhawatiran akan arah politik Indonesia yang semakin condong ke komunisme. Awalnya gerakan ini tidak bertujuan untuk memberontak, melainkan menuntut perubahan dalam struktur pemerintahan. Namun, keterlibatan pihak asing, khususnya Amerika Serikat melalui rencana rahasia untuk membendung komunisme, mendorong eskalasi gerakan ini menjadi konflik bersenjata. PRRI

akhirnya terbentuk di Sumatra Barat sebagai reaksi terhadap ketimpangan pusat-daerah dan dinamika politik global saat itu (Leirissa, 2016).

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa ini menghadapi berbagai tantangan berat, seperti kembalinya Belanda, pembantaian Westerling, serta perjanjian-perjanjian politik yang merugikan, hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, meskipun Irian Jaya belum termasuk. Pemerintah Indonesia kemudian berupaya menyatukan kembali wilayah NKRI yang sempat terpecah⁵. Dalam masa revolusi 1945–1949, pejuang dari Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam menentang kembalinya Belanda, dan wilayah ini menjadi pusat perlawanan serta basis Negara Indonesia Timur yang dibentuk Belanda dalam sistem negara federal (Kahin, 1990).

Setelah Revolusi 1945–1950, Indonesia masih diliputi persoalan politik dan ekonomi, termasuk kegagalan demokrasi, korupsi, ketimpangan wilayah, dan krisis kepercayaan terhadap sistem parlementer. Ketegangan memuncak pada 1957, ditandai dengan mundurnya Hatta, pernyataan Soekarno yang kontroversial, serta meningkatnya ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Di tengah kondisi ini, Gubernur Sulawesi, Andi Pangerang Pettarani, melaporkan situasi genting di Indonesia Timur dan menuntut otonomi luas serta dana pembangunan. Ketidakpuasan ini kemudian melahirkan gerakan PERMESTA pada 2 Maret 1957 sebagai bentuk protes dan tuntutan keadilan fiskal serta otonomi daerah. Gerakan Permesta diinisiasi oleh beberapa tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam keberjalanannya, tentu peran serta gagasan-gagasan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut yang kemudian menjadi landasan dari hadirnya gerakan Permesta. Adapun beberapa tokoh yang penulis maksudkan adalah Herman Nicholas Ventje Sumual, Mohammad Saleh Lahade, Andi Pangerang Pettarani, Andi Muhammad Jusuf Amir, Alex Evert Kawilarang, dan Henk Rondonuwu (Kurniawan, 2019)

Pemberontakan ini dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu ketidakpuasan daerah luar Jawa seperti Sumatra dan Sulawesi terhadap eksploitasi sumber daya mereka oleh pemerintah pusat tanpa imbalan yang sepadan, penolakan para komandan militer daerah terhadap kebijakan sentralisasi kekuasaan

oleh A.H. Nasution yang merotasi perwira dari daerah asalnya, serta ketegangan ekonomi akibat kebijakan pusat yang dianggap diskriminatif, termasuk monopoli pemasaran hasil bumi seperti kopra di Sulawesi yang memicu penyelundupan dan krisis ekonomi lokal. Pemberontakan berdampak luas di berbagai bidang, mulai dari militer dengan dilakukannya penumpasan tegas oleh pemerintah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai pemberontak, hingga politik, di mana Sukarno memanfaatkannya untuk membubarkan Partai Masyumi dan PSI karena keterlibatan atau sikap diam para tokohnya. Secara pemerintahan, peristiwa ini memperkuat posisi Sukarno dan menjadi titik awal menuju sistem Demokrasi Terpimpin. Sementara itu, dari sisi sosial dan regional, pemberontakan memicu demoralisasi serta gelombang migrasi besar dari wilayah terdampak seperti Sumatra Barat ke kota-kota besar. Pemberontakan ini memiliki karakteristik khas, yaitu bukan gerakan separatis melainkan upaya membentuk pemerintahan nasional baru yang antikomunis dan lebih konservatif sebagai respons terhadap dominasi PKI. Gerakan ini dipelopori oleh komandan militer daerah yang kecewa pada pusat, serta mendapat dukungan rahasia dari Amerika Serikat berupa senjata dan pelatihan, juga akses ke pangkalan di Malaya, Singapura, dan Filipina (Cribb & Kahin, 2004)

C. Dampak Pemberontakan Terhadap Politik Nasional dan Masa Depan Orde Lama

1. Ketidakstabilan Politik dan Konflik Ideologi

Pemberontakan yang terjadi selama Orde Lama, seperti konflik antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis, memperparah ketegangan ideologis di Indonesia. Persaingan ini menyebabkan instabilitas politik yang berkelanjutan, di mana pemerintah sering mengambil langkah-langkah otoriter untuk mempertahankan kekuasaan, termasuk sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Hal ini mengakibatkan pengurangan ruang demokrasi dan kebebasan politik.

2. Munculnya Gerakan Perlawanan dan Tekanan Politik

Pemberontakan dan ketidakpuasan rakyat, termasuk aksi moral seperti Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), menuntut perubahan politik mendasar,

termasuk pembubaran unsur-unsur yang terkait dengan PKI dalam kabinet dan penurunan harga kebutuhan pokok. Tritura berhasil mengakhiri masa Demokrasi Terpimpin Orde Lama dan membuka jalan bagi transisi kekuasaan (Anwar, 2019).

3. Peristiwa G30S dan Krisis Politik

Puncak ketegangan politik terjadi pada 1965 dengan Gerakan 30 September (G30S), yang melibatkan PKI dan berujung pada kekacauan nasional serta pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Peristiwa ini melemahkan posisi Presiden Soekarno dan memperkuat posisi militer di bawah Jenderal Soeharto, yang kemudian mengambil alih kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966 (Asvi, 2010).

D.Dampak Terhadap Masa Depan Orde Lama

1. Berakhirnya Orde Lama dan Munculnya Orde Baru

Pemberontakan dan krisis politik yang dipicu oleh konflik ideologi dan pemberontakan G30S menyebabkan runtuhnya Orde Lama. Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru pada tahun 1967, yang menandai perubahan sistem pemerintahan dari Demokrasi Terpimpin ke Demokrasi Pancasila dengan pendekatan yang lebih sentralistik dan otoriter namun stabil secara politik (Kompas.com, 2022)

2. Transformasi Politik dan Kebijakan Nasional

Orde Baru menolak komunisme secara tegas sebagai dampak langsung dari pemberontakan dan konflik ideologi pada Orde Lama. Politik luar negeri yang bebas aktif tetap dipertahankan, tetapi dengan pendekatan yang lebih moderat dan pragmatis. Orde Baru juga fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, berbeda dengan Orde Lama yang lebih menekankan perjuangan ideologis dan nasionalisme (Herlambang, 2014).

3. Warisan Ketegangan Sosial dan Politik

Masa Orde Lama meninggalkan warisan ketegangan sosial dan politik yang mempengaruhi dinamika Indonesia selanjutnya. Sentralisasi

kekuasaan dan pembatasan kebebasan politik yang terjadi pada Orde Lama menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan berikutnya agar lebih mengedepankan stabilitas dan pembangunan, meski Orde Baru juga menghadapi kritik terkait korupsi dan pelanggaran HAM (Rira, 2019).

4. Pengaruh Terhadap Struktur Militer dan Keamanan Nasional

Selain dampak politik dan ideologis, pemberontakan PRRI dan Permesta turut mendorong perubahan besar dalam struktur militer nasional. Pemerintah pusat, yang menyadari lemahnya koordinasi antara militer pusat dan daerah, mulai memperkuat komando terpusat dan membentuk struktur militer yang lebih hierarkis serta sentralistik. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) yang berada langsung di bawah kendali Markas Besar Angkatan Darat (Yulianto, 2016).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah kemungkinan munculnya kekuatan militer daerah yang terlalu otonom dan potensial untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Dengan sistem ini, loyalitas pasukan lebih diarahkan kepada pusat ketimbang pada tokoh-tokoh militer daerah. Dalam jangka panjang, model Kodam menjadi tulang punggung pertahanan dalam masa Orde Baru, yang tidak hanya berperan dalam bidang keamanan tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat (Suryono, 2020).

Peristiwa ini juga menjadi justifikasi bagi Soekarno dan kemudian Soeharto untuk memperluas peran militer dalam pemerintahan sipil melalui konsep Dwi Fungsi ABRI, yakni sebagai kekuatan pertahanan sekaligus sosial-politik. Konsep ini menjadi karakteristik penting rezim Orde Baru, yang bertahan hingga era Reformasi tahun 1998 (Mietzner, 2009).

E. Refleksi Historis: Pembelajaran dari Pemberontakan PRRI dan Permesta

Salah satu pelajaran penting dari pemberontakan PRRI dan Permesta adalah pentingnya membangun komunikasi politik yang sehat antara

pemerintah pusat dan daerah. Ketimpangan pembangunan dan distribusi kekuasaan terbukti menjadi akar dari ketidakpuasan yang berujung pada konflik. Pemerintah pasca-Orde Lama hingga Reformasi diharapkan mampu menghindari pengulangan sejarah dengan membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan memperkuat desentralisasi fiskal secara adil (Buehler, 2010).

Selain itu, pemberontakan ini menunjukkan bahwa stabilitas negara tidak dapat dijaga hanya dengan kekuatan militer semata. Upaya represif dapat menyelesaikan gejala jangka pendek, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menciptakan luka sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih dialogis dan berbasis rekonsiliasi harus dikedepankan dalam menyikapi konflik politik dan kekecewaan masyarakat daerah.

Penting pula dicatat bahwa ketegangan ideologis yang menyertai masa itu, seperti antara nasionalisme, Islamisme, dan komunisme, harus dikelola dengan bijak oleh pemerintah ke depan. Pembelajaran dari masa lalu mengajarkan bahwa inklusivitas dalam bernegara menjadi pilar utama dalam merawat keberagaman Indonesia. Maka dari itu, refleksi terhadap sejarah PRRI dan Permesta perlu dijadikan rujukan strategis dalam merumuskan kebijakan nasional ke depan (Heryanto, 2006).

Kesimpulan

Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi akibat sistem parlementer yang rapuh, sentralisasi kekuasaan, serta kesenjangan pusat-daerah. Dalam konteks inilah pemberontakan PRRI dan Permesta (1957–1958) muncul sebagai respons terhadap ketimpangan fiskal, dominasi Jakarta dalam pengambilan kebijakan nasional, dan kekhawatiran terhadap pengaruh komunisme yang semakin menguat di tubuh pemerintahan pusat. Kedua gerakan ini, meskipun pada akhirnya berhasil ditumpas secara militer, merupakan peringatan serius akan kegagalan komunikasi antara pusat dan daerah, serta mencerminkan kerentanan struktur politik nasional saat itu. Pemberontakan ini mempercepat perubahan arah pemerintahan menuju Demokrasi Terpimpin yang lebih

sentralistik di bawah kepemimpinan Soekarno, sekaligus memperkuat polarisasi ideologi di tingkat nasional. Selain menjadi tonggak awal runtuhnya sistem parlementer, PRRI dan Permesta juga memberikan dampak jangka panjang bagi pembentukan sistem politik Indonesia. Runtuhnya Orde Lama, munculnya Orde Baru, dan penguatan militer dalam politik adalah sebagian dari konsekuensi historis yang bisa ditelusuri akarnya dari krisis ini. Warisan ketegangan pusat-daerah yang ditinggalkan tetap menjadi pelajaran penting hingga kini, bahwa stabilitas nasional hanya dapat dicapai melalui pemerintahan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi daerah.

Daftar Pustaka

- Aryasahab, D. F. (2023). Sejarah PRRI/Permesta: Awal mula munculnya otonomi daerah secara menyeluruh di Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 8(1), 37-44. <https://doi.org/10.31764/historis.v8i1.12483>
- Audrey R. Kahin. (1990). *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan* (Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti).
- Buehler, M. (2010). *Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere*. In E. Aspinall & M. Mietzner (Eds.), *Problems of Democratisation in Indonesia* (pp. 267–285). Singapore: ISEAS Publishing.
- Herlambang, Wijaya. *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*. (Jakarta: Indoprogress, 2014).
- Heryanto, A. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. New York: Routledge.
- Kompas.com , "Akhir Pemerintahan Orde Lama," 25 Agustus 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/25/120000779/akhir-pemerintahan-orde-lama>
- Leirissa. R. Z. Prri-Persemesta: Tinjauan Historiografis. *Jurnal Studi Amerika*. 4 , 56-72
- M.C Ricklefs, *Sejarah Modern Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

Mietzner, M. (2009). *Military politics, Islam, and the state in Indonesia: from turbulent transition to democratic consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.

Nuradhawati, R. (2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 2(01), 152-170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>

Roosa, J. (2008). *Dalih pembunuhan massal: Gerakan 30 September dan kudeta Suharto*. Nobodycorp.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.